

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 50 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2014**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mendapatkan masukan tentang dampak reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP terhadap para pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang tingkat kepuasan para pemangku kepentingan sebagai dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh LKPP;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi tim Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2014;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 106.01.1.970968/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP 2014 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP pada para pemangku kepentingan yang mendapatkan pelayanan dari LKPP; dan
- b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretariat Reformasi Birokrasi LKPP;

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2014;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN TIM
PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI LKPP TAHUN 2014
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 MEI 2014

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2014

Koordinator : Arry Pistawati
Anggota : 1. Swandita Adinata
2. Fernando Simanulang
3. Nurmala Santi P. Situmorang
4. Koeswanto
5. Achmad Firdaus
6. Andi Wijaya
7. Santoso
8. Masagus Fikri
9. Baron Queen Eko
10. Aman
11. Agung Basuki

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



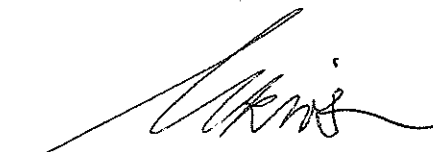
EIKO WHISMULYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM TIM PELAKSANA SURVEI
STAKEHOLDER EKSTERNAL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2014
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 MEI 2014

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP
TAHUN 2014**

| No. | Kedudukan dalam Tim | Honor (Rp) |
|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Koordinator | 250.000 |
| 2 | Anggota | 250.000 |

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



EIKO WHISMULYADI